

Ijazah Palsu dan Pendidikan Kita

Oleh Achmad M Akung

TERBONGKARNYA kasus Institute Manajemen Global Indonesia (IMGI) yang melakukan praktik pendidikan fiktif dan memproduksi ijazah palsu sontak menyentak kesadaran kita. IMGI yang namanya mendadak mengorbit lainnya selebritis, adalah *prototype* pabrik ijazah (*diploma mills*) yang tergolong sukses. Semenjak beroperasi beberapa tahun silam, institut ini disinyalir telah memiliki 60 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (*Suara Merdeka*, 20 Agustus 2005).

Tak tanggung-tanggung, 5000 nama diduga telah menjadi klien dan sukses memperoleh dan mempergunakan ijazah palsu produksi institut ini. Dan yang lebih hebat serta mencengangkan, bahwasanya IMGI mampu mencetak sarjana tidak hanya strata satu, melainkan juga sarjana sekaliber master dan program doktoral hanya dalam tempo beberapa bulan saja. Tentunya, tidak ada istilah gratis untuk itu semua, karena untuk mendapatkan gelar tersebut, seorang mahasiswa (baca: klien) harus menyetorkan uang mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Menilik keberanian dan keluasan jaringannya, serta deretan nama pengguna jasa institut ini, di mana di dalamnya terdapat beberapa nama tokoh penting mulai dari politisi, dai hingga polisi. Artinya bahwa praktik jual beli ijazah dan pendidikan tinggi fiktif ini telah mendapatkan legalitas dan pengakuan dari masyarakat maupun dari pemerintah. Ijazah aspal dan gelaran yang melekat di balik nama seorang kliennya dengan demikian akan dihargai setara dengan alumni perguruan tinggi ternama dengan aspek legalitas yang juga diakui.

Sebagai kedoknya, biasanya perguruan tinggi *diploma mills* ini awalnya memang menawarkan program perkuliahan yang riil. Namun seiring dengan naiknya peminat dan klien pengguna jasanya, secara perlahan namun pasti orientasi intelektualnya kemudian bergeser menjadi orientasi bisnis. Karena senyatanya, intelektualisme itu semu yang hanyalah dijadikan sebagai kamuflase dari orientasi bisnis yang menjadi ruh eksistensinya.

Terungkapnya jaringan pendidikan fiktif ini semestinya membuka kesadaran sekaligus kewaspadaan kita, bahwa kasus serupa di Tanah Air tercinta ini sangatlah banyak. Bisa jadi, IMGI hanyalah satu di antara sejuta penyedia layanan perguruan tinggi fiktif. Fenomenanya tak ubahnya sebuah puncak gunung es, di mana nun jauh di sana, di kedalaman samudera kehidupan bangsa ini, kasus serupa luar biasa banyaknya. Hanya saja, karena teramat banyaknya, semua telah dianggap sebagai hal biasa yang lumrah, jamak dan sah terjadi.

Mentalitas Menerabas

Koentjaraningrat beberapa dekade silam telah mensinyalir kecenderungan mentalitas menerabas yang menghinggapi masyarakat modern kita. Diksi ini barangkali akan sangat tepat untuk menggambarkan kasus perguruan tinggi fiktif ini, yang merupakan fakta betapa memprihatinkannya kulaitas pendidikan serta kualitas kehidupan kita.

Mentalitas menerabas merupakan sebuah kecenderungan yang menghinggapi masyarakat kita untuk mencari jalan pintas dengan perjuangan dan pengorbanan yang seminimal mungkin guna mencapai target yang diinginkannya. Dalam bahasa psikologi, kita mengenal konsep hedonisme, sebuah faham yang mendewakan kesenangan pribadi dengan menyingkir sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesulitan dan kesengsaraan.

Kita akan mengkaji lebih jauh, betapa mentalitas menerabas yang hedonis ini telah sedemikian parah menjangkiti masyarakat kita melalui analisis atas kasus ini.

Beberapa dekade silam, ketika pendidikan belum semaju sekarang, sarjana adalah sebuah barang langka yang sulit didapat dan sedemikian mahal harganya. Untuk mendapatkannya, konon pada zaman dahulu, diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik waktu, tenaga dan juga biaya. Dan yang pasti untuk menjadi seorang cendekia benar-benar dibutuhkan ketajaman pikiran, kualitas kecerdasan, kemampuan intelektual, serta kebijaksanaan yang istimewa. Tidak semua orang bisa menggapai keagungan gelar akademis ini karena persyaratannya yang sedemikian ketat dan berat.

Namun demikian, beratnya pengorbanan untuk sebuah gelar akademi akan pupus terobati manakala gelar tersebut akan memberi banyak hal kepada pnyandangnya. Gelar akademis segera akan membawa sebuah konsekuensi logis, berupa status yang dalam perspektif ilmu sosial disebut *achieved status*. Dalam bahasa keseharian, tak salah apabila awam biasanya menempatkan mereka pada status sosial yang terhormat dan tinggi.

Di sinilah kita bisa mencermati betapa lihai dan beraninya para kriminil yang beroperasi di area dunia pendidikan. Tingginya permintaan pasar adalah sebuah peluang bisnis tersendiri yang menggiurkan. Awalnya barangkali dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip intelektual. Sedikit demi sedikit aturan dan norma keilmuan hingga aspek legalitas pun ditinggalkan demi menuruti hedonismenya, dengan menjual produk ijazah tanpa proses pendidikan yang semestinya. Sebuah simbiosis yang saling menguntungkan lantas tercipta antara dunia pendidikan fiktif yang mendapatkan limpahan materi yang instan dengan mahasiswa (baca: klien) yang segera akan memperoleh gelar sarjana yang prestisius.

Moralitas

Kasus pendidikan fiktif dan ijazah palsu setidaknya mengindikasikan betapa carut marutnya dunia pendidikan di negeri ini. Kita dapat mengkajinya, setidaknya dari dua perspektif. Pertama, kualitas sistem kontrol dan kebijakan dari pemerintah. Semestinya pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, benar-benar mengontrol dan mengawasi dengan ketat, semenjak berdirinya sebuah lembaga pendidikan, pada proses belajar-mengajar, hingga kualitas lulusannya. Dalam kasus IMGI ini, kita menyaksikan betapa buruknya sistem kontrol dan kebijakan pemerintah, sehingga memunculkan kecurigaan telah terjadi praktik kolusif yang manipulatif, sehingga sedemikian banyak sarjana gadungan telah tercetak.

Kedua, aspek moralitas yang semakin sulit kita temukan di masyarakat kita, hingga di dunia pendidikan sekalipun. Ijazah palsu dan pendidikan fiktif ini pun sejatinya hanya sebagian kecil dari masalah moralitas yang dihadapi dunia pendidikan kita yang tampil dalam sosok yang vulgar dan berani melawan hukum. Namun, apabila kita mencermati lebih jauh dunia pendidikan kita, pendidikan yang formal, legal dan terpandang sekalipun, kita akan disuguhi fakta betapa aspek moral benar-benar telah termarginalkan oleh hedonisme.

Kita yang pernah menikmati bangku sekolah, apalagi seorang pengajar faham benar betapa dunia pendidikan kita benar-benar rapuh dari sisi moralitas. Kasus kecurangan dan pelanggaran akademis seperti mencontek, perjokian, kerja sama, perbantuan hingga ijazah palsu sudah sedemikian marak, sebuah kelaziman, sehingga tidak lagi dipandang sebagai sebuah anomali yang menyimpang dari norma. Tanyakanlah pada diri kita dan putera-puteri kita, adakah mereka melakukan kecurangan akademis dengan mencontek ketika ujian di sekolah? Seandainya mau jujur, barangkali jawabannya akan mencengangkan kita.

Dimulai dari hal-hal kecil yang remeh-temeh dan dekat dengan kita inilah, kualitas pendidikan negeri ini sejatinya tengah terdekonstruksi dengan massifnya. Belum lagi ketika kita berhadapan dengan kooptasi kekuasaan yang koersif. Kasus perjokian yang dilakukan oleh seorang petinggi kabupaten di Cilacap, atau penggunaan ijazah palsu anggota Dewan adalah sebagian kecil fenomena yang mampu terungkap oleh mata publik.

Gelar Vs Kompetensi

Pendidikan adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan antar generasi. Kompetensi, keahlian dan penguasaan mendalam atas sebuah ilmu tidak bisa terjadi begitu saja, namun harus melalui pentahapan, kurikulum, program pengajaran serta strategi belajar-mengajar yang dirancang dengan baik. Proses transfer ilmu pengetahuan ini jelas akan memakan waktu yang cukup panjang dan tidak mungkin dicapai dengan metode instan, apalagi dibeli dengan lembaran rupiah.

Idealnya, sebagaimana dikemukakan di depan, gelar kesarjanaan adalah sebuah penanda kesempurnaan tingkat penguasaan dan kompetensi yang paripurna atas

sebuah disiplin keilmuan. Namun sayangnya, orientasi tersebut tampaknya telah mulai tergerus oleh pusaran zaman. Titel atau gelar sarjana kini bukanlah sebuah jaminan kompetensi yang paripurna, tetapi seringkali hanya tampak sebagai sederet huruf yang melekat pada nama seseorang sebagai sebuah simbol status yang formalistik tanpa kemampuan yang memadai.

Mereka terlahir melalui proses yang tidak semestinya, dan dibesarkan oleh akademisi gadungan yang melacurkan intelektualitasnya. Barangkali terdengar agak sarkastik memang, namun itulah fakta yang tengah menggerogoti bangsa kita. Sangat tidak masuk akal ketika orang hanya sesekali berangkat kuliah, atau bahkan tidak pernah kuliah sama sekali, namun mendapatkan ijazah gelar kesarjana sebagai simbol kompetensi keilmuan.

Begitu kesalnya, dalam kultur masyarakat kita, sering muncul anekdot dalam *guyon parikena* yang nylekit dengan menyalahartikan gelar sarjana semacam ini. Mohon maaf, tanpa bermaksud menyinggung pihak mana pun, masyarakat seringkali memplesetkan gelar MM sebagai (Magister of Mbuh), MBA (Magister Biaya Akeh), SSos (Sarjana Ora Sinau), SPd (Sarjana Penuh Dana), ST (Sarjana Tipu-tipu), SAg (Sarjana Agak Gimana), serta masih banyak plesetan titel lain, yang mempertanyakan keabsahan proses serta kompetensi gelar yang disandangnya.

Anekdote semacam ini tentunya timbul akibat banyaknya orang yang menyandang gelar tersebut, namun tidak memiliki kompetensi dan kualitas keilmuan yang memadai. Tentu saja kondisi ini akan sangat merugikan bagi mereka, para penyandang gelar sejati yang telah melewati kawah candradimuka pendidikan dengan sungguh-sungguh, karena masyarakat seringkali meng-*gebyah uya* dengan memberikan citra yang sama pada objek yang sejatinya berbeda.

Tapi inilah realitas masyarakat kita yang kemudian menjadi kebal, sehingga tidak terlalu ambil peduli pada kondisi yang memprihatinkan ini. Dalam kultur modern yang hedonis dan formalistik, simbol-simbol justru seringkali dianggap lebih berharga dari pada esensi yang melatari kelahiran simbol tersebut. Termasuk dalam dunia kerja, penilaian masyarakat juga belum beranjak dari aspek simbol status yang formal berupa gelar, bukannya kompetensi yang sebenarnya lebih signifikan peranannya dalam menentukan kinerja seseorang.

Dalam kasus pemalsuan ijazah, perspektif psikologi behaviorisme menjelaskan bahwa masyarakat kita juga punya andil dalam memberikan penguatan yang cukup signifikan berupa penghargaan dan ganjaran (*reward*) berupa kenaikan status sosial yang tinggi. Sementara aspek hukuman (*punishment*), sekadar sanksi sosial pun, hampir-hampir tidak ada. Paling banter, kalau lagi apes, mereka ketahuan dan berurusan dengan pihak berwajib, itu pun relatif sangat jarang terjadi.

Artinya, sebuah proses belajar sosial tengah terjadi dalam masyarakat kita melalui modeling dengan objek orang-orang besar yang sukses dengan membeli gelar.

Yang kita perlukan saat ini, seandainya kita berharap kualitas kehidupan yang lebih baik, adalah upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa untuk mencegah pembusukan intelektual ini bertambah parah. Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, adalah institusi yang paling berkompeten dan bertanggungjawab terhadap hitam-putih wajah pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas.

Sementara masyarakat, sudah saatnya terjaga, lebih cerdas dan lebih bijak dalam memandang dan memberikan perlakuan terhadap aneka ragam gelar akademis di sekitar kita. Barangkali inilah momentum untuk membenahi kembali cara pandang kita untuk tidak selalu silau dengan status dan gelar formal, tetapi justru lebih melihat pada kompetensi, kemampuan intelektual akademis serta kualitas pribadi seorang cendekia. (24)

-Achmad M Akung, dosen PS Psikologi, Universitas Diponegoro, Semarang.